

## Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Brebes

Ikhsan Fauzi Gunawan Putra<sup>1</sup>, Rachmat Mudiyo<sup>2</sup>, Imam Wahyudi

Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup> [ikhsangp99@gmail.com](mailto:ikhsangp99@gmail.com)

---

<b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4984">https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4984</a>	<b>Received:</b> 11 Januari 2024	<b>Accepted:</b> 11 Maret 2024	<b>Publish:</b> 25 April 2024
--	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

---

**ABSTRAK:** Pembangunan perumahan yang pesat pada Kabupaten Brebes menjadi latar belakang dalam diperlukannya studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk mengetahui besaran dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya untuk perumahan di Kabupaten Brebes; Menilai hambatan apa sajakah yang dihadapi pada implementasi kebijakan; dan Memberikan solusi strategis yang diprioritaskan dalam menghadapi hambatan utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian mixed methods yang menggunakan desain tipe explanatory yang termasuk dalam model sequential (urutan). Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sudah melaksanakan tiap butir komponen peraturan dalam Implementasi Kebijakan ANDALALIN untuk perumahan namun terdapat beberapa kekurangan yang bersifat administratif dan dibutuhkan tindak lanjut. Tujuh aspek yang digunakan dalam mengevaluasi hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah Aspek Sosialisasi atau Forum, Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), Aspek Kewenangan Status Jalan, Aspek Website Andalalin, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Monitoring dan Evaluasi, dan Aspek Sanksi. Dari hasil analisis yang dilakukan, hambatan dengan nilai prioritas tertinggi ada pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu tingkat keterlibatan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan ANDALALIN dimana solusi strategis yang diperlukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi mengenai SOP secara teratur guna memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten.

**Kata Kunci:** Andalalin; Implementasi Kebijakan; Hambatan dan Solusi Strategis

**ABSTRACT:** The rapid development of housing in Brebes Regency provides the background for the necessity of conducting a Traffic Impact Analysis (ANDALALIN) study to determine the magnitude of traffic impacts caused by this development. This research aims to evaluate the implementation of the Traffic Impact Analysis Policy (ANDALALIN) based on applicable regulations, especially for housing in Brebes Regency; assess the obstacles faced in policy implementation; and provide prioritized strategic solutions to address the main obstacles. This type of research is a mixed methods study using an explanatory sequential design model. The research indicates that the Brebes Regency Government has implemented each component of the ANDALALIN Policy for housing, but there are some administrative deficiencies that require follow-up actions. Seven aspects used in evaluating obstacles in policy implementation include Socialization or Forums Aspect, Standard Operating Procedure (SOP) Aspect, Road Status Authority Aspect, ANDALALIN Website Aspect, Human Resources (HR) Aspect, Monitoring and Evaluation Aspect, and Sanction Aspect. From the analysis conducted, the obstacle with the highest priority value lies in the Standard Operating Procedure (SOP) aspect, specifically the level of involvement of relevant parties in implementing the ANDALALIN policy, where the strategic solution needed is the provision of regular training and socialization on SOP to ensure consistent understanding and application.

**Keyword:** Andalalin; Policy Implementation; Obstacles and Strategic Solutions

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diperkirakan akan menimbulkan masalah terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan transportasi jalan. Oleh karena itu, analisis dampak lalu lintas menjadi sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 menyebutkan jika infrastruktur yang sudah ada tidak mampu menanggulangi lalu lintas dengan baik, langkah Penangan diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi negatif pembangunan terhadap

kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di sekitar zona pembangunan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). ANDALALIN adalah evaluasi yang menilai konsekuensi dari pertumbuhan dan penggunaan lahan terhadap aliran lalu lintas di suatu area jalan dan infrastruktur transportasi yang berdekatan.

Pembangunan perumahan di Kabupaten Brebes adalah suatu fenomena yang memiliki dampak yang besar dan penting bagi perkembangan wilayah tersebut. Perumahan yang signifikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di kabupaten tersebut. Dengan adanya pembangunan perumahan yang signifikan, dapat diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) menjadi sangat relevan dan penting. ANDALALIN adalah instrumen kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan, berjalan sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan ANDALALIN diterapkan dalam konteks peruntukan lahan perumahan di Kabupaten Brebes menggunakan metode Miles & Huberman. Hal ini mencakup rincian peruntukan, lokasi perumahan, hasil analisis kinerja lalu lintas, serta kelengkapan dokumen ANDALALIN berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kab. Brebes No. 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) beserta solusi strategis yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut yang akan diolah menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP).

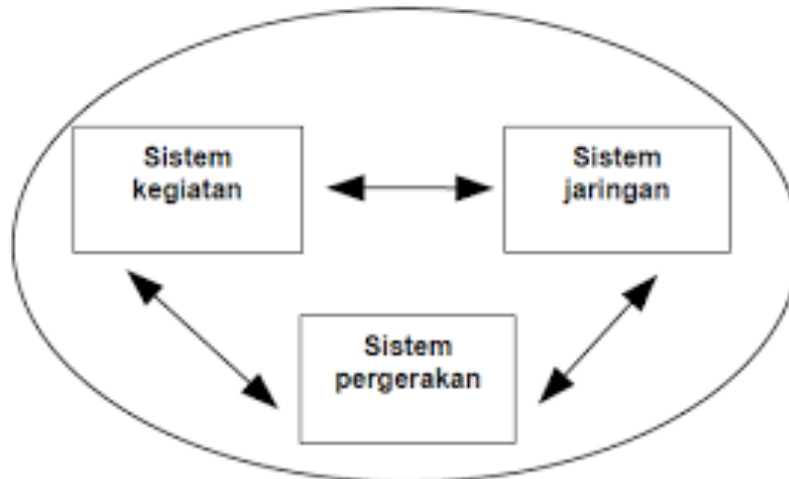
## II. LANDASAN TEORI

### Sistem Transportasi Makro

Sistem merujuk pada bagian yang terorganisir dan terhubung satu sama lain, berjalan secara terstruktur, dan memiliki tujuan yang serupa. Di sisi lain, transportasi mengacu pada upaya perpindahan manusia atau barang dari suatu titik awal ke titik tujuan. Transportasi merupakan proses menggerakkan muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dua aspek penting dalam transportasi adalah pergerakan untuk mengubah lokasi, entah itu untuk muatan atau penumpang [1]. Sistem transportasi makro merupakan suatu sistem transportasi secara komprehensif. Apabila sistem ini dipecahkan maka terbagi menjadi beberapa sub sistem dibawahnya yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Berikut merupakan sistem transportasi mikro[2]:

- a. Sistem.kegiatan (Tata.guna.lahan)
- b. Sistem.jaringan (Pasokan tranportasi)
- c. Sistem.pergerakan (Lalu.lintas)
- d. Sistem.kelembagaan

Terdapat diagram keterkaitan dari ketiga sistem yakni sistem kegiatan/tata guna lahan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan yang dirangkum pada sebuah sistem yaitu kelembagaan.



Gambar 1. Sistem Kelembagaan

Melihat diagram diatas, maka dapat diketahui ketiga sistem ini merupakan hal yang saling terkait dan terikat didalam satu sistem yaitu sistem transportasi makro [3].

### Perencanaan Transportasi

Perencanaan transportasi merujuk pada penyusunan rencana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi, seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Misi dari perencanaan tersebut adalah untuk mengembangkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Salah satu konsep perencanaan transportasi yang terus berkembang adalah Model Perencanaan Transportasi 4 Tahap, yang meliputi langkah-langkah proses berikut:

- a. **Bangkitan dan Tarikan Pergerakan (*Trip Generation*)**  
Bangkitan pergerakan adalah bagian dari tahap pemodelan yang melakukan proyeksi terhadap jumlah pergerakan yang dimulai dari suatu zona atau tata guna lahan, sekaligus memperkirakan jumlah pergerakan yang menarik ke arah suatu tata guna lahan atau zona tertentu. Pergerakan lalu lintas dianggap sebagai hasil dari pola tata guna lahan yang membentuk arus pergerakan [4].
- b. **Sebaran Pergerakan (*Trip Distribution*)**  
Pada konteks rangkaian proses perencanaan transportasi, sebaran pergerakan adalah unsur yang terkait dengan pergerakan antar zona, serta memfasilitasi interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi, dan aliran lalu lintas [5]. Dalam fase ini, dilakukan penentuan jumlah aliran lalu lintas yang berpindah dari satu zona ke zona lain.
- c. **Pemilihan Moda (*Moda Split*)**  
Pemilihan moda memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan transportasi. Ketika terjadi interaksi antara dua zona tata guna lahan di dalam suatu kota, keputusan harus diambil mengenai cara interaksi tersebut akan dilakukan, termasuk dalam hal pemilihan moda seperti penggunaan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Jika memilih menggunakan kendaraan, opsi yang tersedia melibatkan kendaraan pribadi seperti sepeda, sepeda motor, atau mobil, atau menggunakan angkutan umum seperti bus, becak, angkutan kota, bajaj, atau taksi [5].
- d. **Pemilihan Rute (*Trip Assignment*)**  
Pemilihan rute atau trip assignment memiliki tujuan untuk mengidentifikasi jalur-jalur yang dipilih oleh pengguna jalan dalam suatu jaringan transportasi. Pemilihan rute dapat dikategorikan sesuai dengan berbagai faktor pertimbangan, dengan dasar pemikiran bahwa tidak semua pengguna jalan dari satu titik ke titik lain akan memilih jalur yang sama [5].

### Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Analisis Dampak Lalu Lintas pada dasarnya adalah penilaian terhadap dampak pengaturan pola penggunaan lahan yang mempengaruhi sistem pergerakan lalu lintas di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya arus lalu lintas baru, perpindahan lalu lintas, serta aktivitas kendaraan yang masuk dan

keluar dari wilayah tersebut [6]. Analisis ini merupakan bagian dari tahap pemodelan yang memproyeksikan jumlah pergerakan yang tertarik dari suatu zona atau tata guna lahan. Dengan mengacu pada konsep tersebut, ANDALALIN dapat dijelaskan sebagai penilaian terhadap konsekuensi yang muncul akibat perubahan dalam penggunaan lahan yang mempengaruhi arus lalu lintas di suatu jalan tertentu dan infrastruktur transportasi di wilayah sekitarnya [7].

Ragam jenis tata guna lahan atau wilayah yang memerlukan studi ANDALALIN sebelum memulai proses pembangunan tersedia dalam tabel berikut [8]:

*Tabel 1. Ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan ANDALALIN*

No	Jenis Kegiatan / Usaha	Kriteria ANDALALIN
<b>1</b>	<b>Pusat Kegiatan</b>	
	a. Kegiatan Perdagangan, Perbelanjaan/retail	500 m2 luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri, Industri dan Pergudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah/Universitas	500 siswa
	2. Lembaga kursus	bangunan dengan 50 siswa per waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m2 luas lantai bangunan
	f. SPBU / Pom bensin	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
	i. Restoran / rumah makan	100 tempat duduk
	j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas 100 penonton dan/atau 10000 m2 luas bangunan
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m2 luas lantai bangunan
	i. Pencucian mobil	2000 m2 luas lantai bangunan
<b>2</b>	<b>Pemukiman</b>	
	a. Perumahan dan Pemukiman	
	1. Perumahan Sederhana.	150 Unit
	2. Perumahan menengah - atas	50 Unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah susun dan Sederhana	100 Unit
	2. Apartemen	50 Unit
	c. Asrama	50 Kamar
	d. Ruko	2000 m2 luas lantai keseluruhan
<b>3</b>	<b>Infrastruktur</b>	
	a. Akses dari / ke jalan tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Bandar Udara	Wajib
	d. Terminal	Wajib
	e. Stasiun kereta api	Wajib
	f. Pool Kendaraan (garasi bus/truk)	Wajib
	g. Fasilitas parkir umum	Wajib
	h. Jalan layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
	i. Lintas bawah ( <i>Underpass</i> )	Wajib

No	Jenis Kegiatan / Usaha	Kriteria ANDALALIN
4	<b>Terowongan (<i>Tunnel</i>)</b> Bangunan / pemukiman / infrastruktur lainnya	Wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (Kendaraan) baru pada jam padat dan atau inya pada jalan yang menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (Kendaraan) baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Sumber : Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020

Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan wilayah yang memiliki dampak dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan kawasan yang berpengaruh

Peruntukan Lahan	Faktor yang dipertimbangkan	Data yang Diperlukan
<b>Pusat Perbelanjaan</b>	a. Pengembangan daerah komersial sejenis yang saling bersaing	Distribusi Penduduk
	b. Waktu perjalanan umumnya maksimal 20 menit	
<b>Perkantoran dan Industri</b>	Waktu perjalanan umumnya diasumsikan waktu perjalanan maksimum 30 menit atau 15-20 km	Distribusi Penduduk
<b>Pemukiman</b>	Waktu perjalanan umumnya diasumsikan waktu perjalanan maksimum 30 menit atau 15 km	Distribusi Penduduk

Sumber : Pedoman Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Departemen Perhubungan (2014)

### Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Beberapa kebijakan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [9]
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2022 tentang Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui Jaringan Digitalisasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

### Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan literatur, banyak penelitian yang telah memanfaatkan ANDALALIN sebagai subjek penelitiannya. Variasi di antara penelitian-penelitian tersebut terutama terletak pada objek yang diselidiki dan metode yang digunakan, seperti metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang digunakan untuk penelitian di Jepara [10] dan Bogor [11]. Kemudian penelitian yang menggunakan

metode deskriptif kualitatif seperti yang dilakukan di Trenggalek [12] dan Kabupaten Sidoarjo [13]. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menggunakan metode *mix methods* menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan teknik *purpose sampling* [14]. Namun, tidak ada penelitian yang ditemukan yang mempelajari implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan kombinasi metode Miles&Huberman dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

### III. METODE PENELITIAN

Desain *mixed methods* diterapkan untuk mendapatkan tujuan penelitian yang diajukan. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) perumahan di Kabupaten Brebes dipecahkan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan analisis data model Miles dan Huberman. Sementara itu, untuk mendapatkan hambatan dan solusi strategis dalam implementasi kebijakan ANDALALIN dijawab melalui pendekatan kuantitatif menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP diaplikasikan dengan tujuan untuk menetapkan prioritas antara alternatif-alternatif dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi masalah di lapangan dan memberikan wawasan baru bagi instansi terkait dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara responden menggunakan kuisioner yang memiliki keahlian di bidang Pemerintahan Kabupaten Brebes. Sedangkan data sekunder melibatkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam implementasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Brebes.

#### **Analisis Miles & Huberman**

##### *Pengumpulan Data*

Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan pendekatan yang objektif.

##### *Reduksi Data*

Data yang telah terkumpul kemudian diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan format yang ditentukan, lalu dirangkum dan dipilah sehingga hanya memfokuskan pada informasi yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

##### *Penyajian Data*

Data yang terkumpul disusun dan dikelompokkan berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik, matriks, dan chart [15]. Pada penelitian ini, data disajikan melalui teks naratif dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam observasi lapangan.

##### *Penarikan/Verifikasi Kesimpulan*

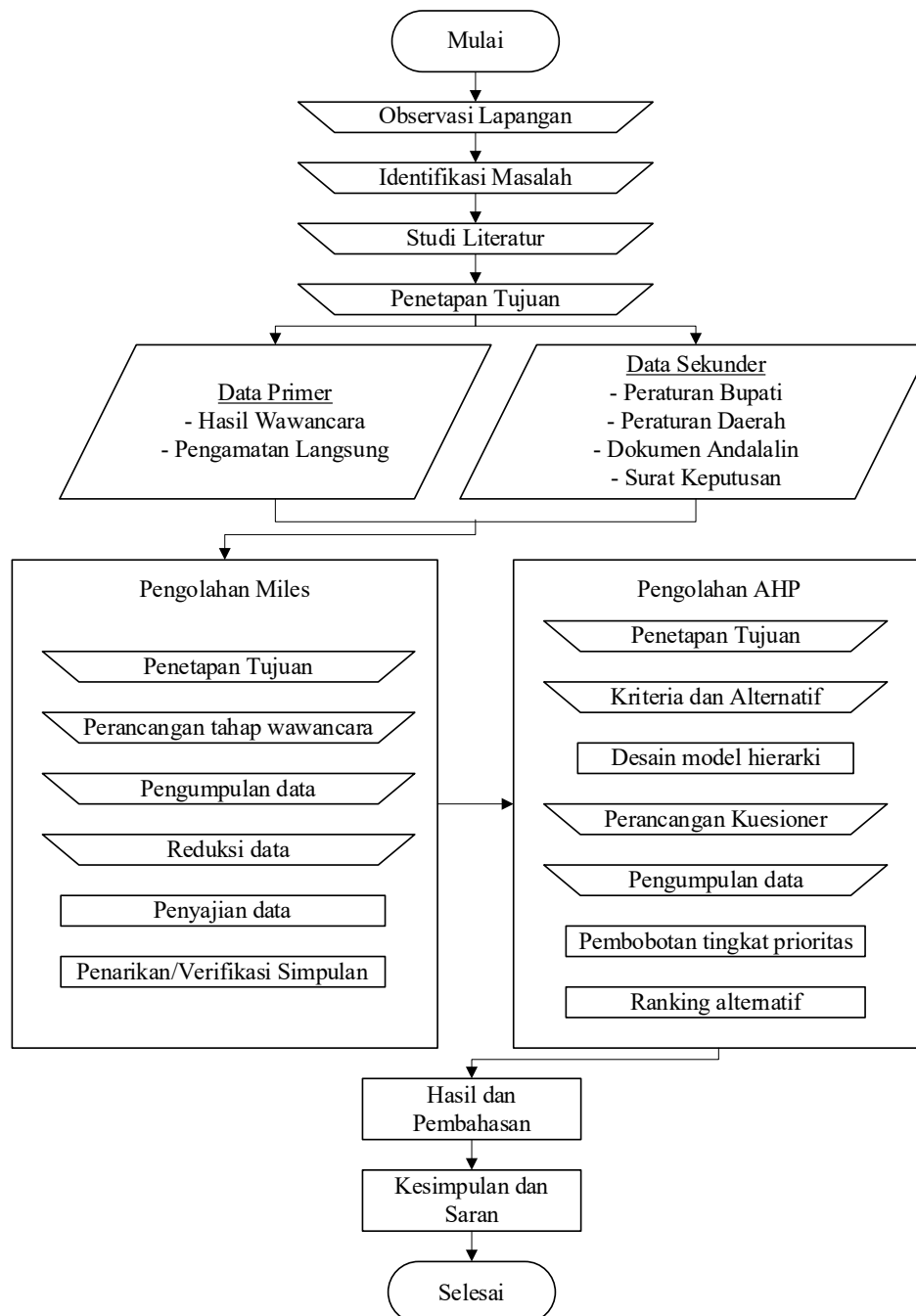
Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan ini dibuat setelah data melalui proses reduksi dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian disampaikan dengan kalimat yang ringkas, padat, dan mudah dipahami. Kesimpulan tersebut kemudian dievaluasi untuk memastikan akurasi, terutama terkait relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan, dan rumusan masalah penelitian.

#### **Analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP)**

Tahap ini merupakan perhitungan skala prioritas untuk menentukan hambatan dan solusi strategis utama dalam melaksanakan kebijakan kedepannya. Data ini didapatkan dari hasil pengisian kuesioner dari expert Pemerintahan Kabupaten Brebes yang telah divalidasi dan kemudian diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada aplikasi Expert Choice versi 11.0.

#### **Diagram Alir Penelitian**

Proses pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahapan yang tercantum dalam diagram alir pada gambar berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 di Kabupaten Berbes, Provinsi Jawa Tengah. Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan mendapatkan hambatan dan solusi strategis dalam implementasi kebijakan ANDALALIN, wawancara dengan *expert* dilakukan di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Brebes. Sementara itu, sampel yang digunakan

untuk mengkaji implementasi ANDALALIN itu sendiri adalah 5 perumahan di Kabupaten Brebes sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

*Tabel 3. Objek kajian Implementasi Kebijakan Andalalin*

No	Nama Perumahan	Alamat	Koordinat	Jumlah Unit Rumah
1	Limbangan Agung Permai 2	Jl. Cemara Desa Kemukten Kec. Kersana	6°54'14.41"S 108°51'47.60"E	170
2	Sakinah Village Kertasinduyasa	Desa Kertasinduyasa Kec. Jatibarang	6°57'3.34"S, 09° 2'57.14"E	126
3	Graha Buana Asri	Jl. Ruas Jalan Wangandalem - Lembarawa	6°54'19.58"S 109° 3'46.24"E	325
4	Shappire Aesthetic Brebes	Desa Padasugih Kec. Brebes	6°53'12.89"S 109° 2'40.64"E	64
5	Grand Surya Residence	Jl. Sultan Agung Desa Pulosari Kec. Brebes	6°53'16.12"S 109° 2'9.64"E	28

#### IV. PEMBAHASAN

##### **Analisis Implementasi ANDALALIN Menggunakan Model Miles dan Huberman**

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan

Dari kelima responden kunci yang telah diwawancarai, implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Brebes telah menjalankan setiap aspek dari peraturan yang ada, memastikan kepatuhan terhadap setiap butir regulasi. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.

2. Fokus dalam Peruntukan Lahan

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh responden, saat ini Kabupaten Brebes sedang banyak melakukan pembangunan perumahan yang membutuhkan pemenuhan persyaratan berupa dokumen ANDALALIN. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis juga akan melakukan kajian mengenai implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dalam peruntukan lahan perumahan.

3. Hambatan dalam Implementasi

Dalam implementasi kebijakan ANDALALIN di Kabupaten Brebes, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh responden kunci, hal ini mencakup Aspek Sosialisasi atau Forum, Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), Aspek Kewenangan Status Jalan, Aspek Website Analisis Dampak Lalu Lintas, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Monitoring dan Evaluasi, dan Aspek Sanksi. Aspek-aspek ini kemudian akan diolah datanya menggunakan AHP untuk mengetahui hambatan utama dan solusi strategis dalam menentukan tindak lanjut dalam implementasi kebijakan tersebut.

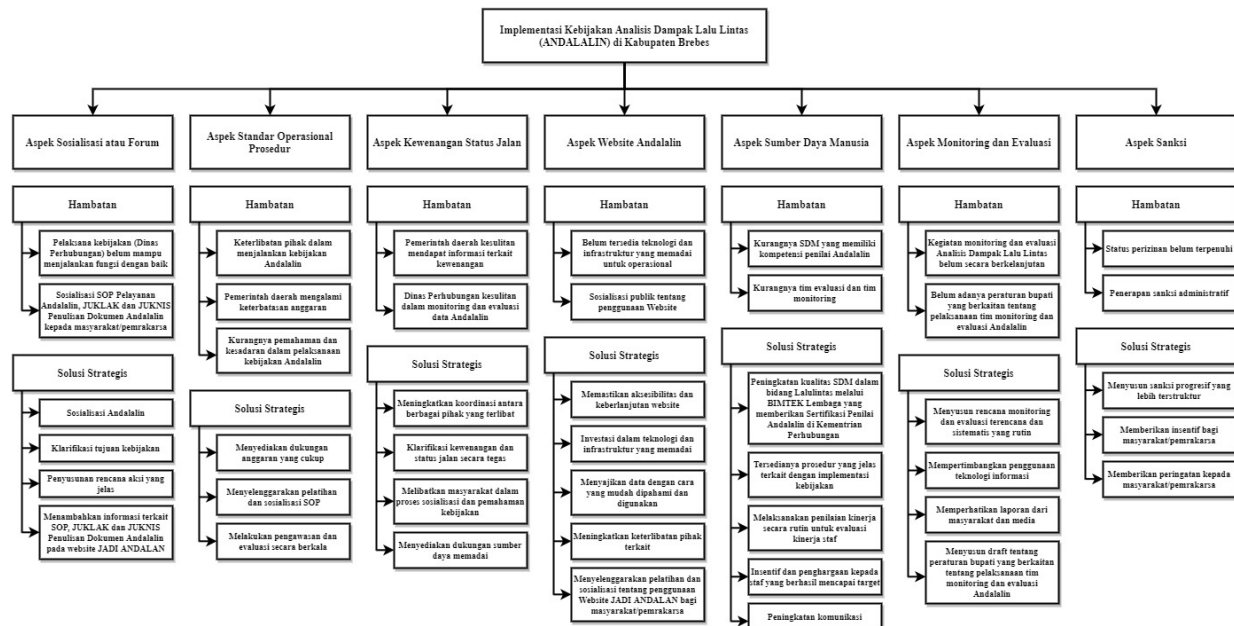
##### **Analisis Implementasi ANDALALIN Menggunakan Model Miles dan Huberman**

Dari lima sampel yang dikaji, terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes telah mempraktikkan standar pemenuhan izin penerbitan usaha melalui implementasi Standar Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pada perumahan-perumahan di Kabupaten Brebes. Tindakan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pihak berwenang untuk memperhitungkan dan mengelola dampak lalu lintas yang mungkin timbul akibat pembangunan proyek-proyek tersebut. Proses pengajuan spesifikasi teknis ANDALALIN perumahan juga telah berdasar pada Peraturan Bupati Kab. Brebes No. 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

##### **Pembobotan Skala Prioritas menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)**



Setelah dilakukan pengumpulan data yang didapat dari *expert* Pemerintah Kabupaten Brebes melalui wawancara, terdapat 7 aspek yang kemudian divalidasi untuk dilakukan penilaian terhadap implementasi analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) beserta hambatan dan solusi strategis yang dapat diberikan. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Aspek dalam Penilaian Implementasi Kebijakan Analisis ANDALALIN Kabupaten Brebes

Hasil pengujian AHP untuk pembobotan skala prioritas hambatan pada 7 aspek dalam implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah sebagai berikut:

Priorities with respect to:	Comb..
<b>Goal: Hambatan Implementasi Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Brebes</b>	
<b>Aspek Sosialisasi</b>	<b>.130</b>
<b>Aspek Standar Operasional Prosedur</b>	<b>.320</b>
<b>Aspek Kewenangan Status Jalan</b>	<b>.060</b>
<b>Aspek Website Andalalin</b>	<b>.074</b>
<b>Aspek Sumber Daya Manusia</b>	<b>.262</b>
<b>Aspek Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>.094</b>
<b>Aspek Sanksi</b>	<b>.060</b>
<b>Inconsistency = 0.03</b>	
<b>with 0 missing judgments.</b>	

Secara berurutan, Aspek yang menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan nilai prioritas sebesar 0.320, kemudian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai prioritas sebesar 0.262, Aspek Sosialisasi dengan nilai priortas sebesar 0.130, Aspek Monitoring dan Evaluasi dengan nilai prioritas sebesar 0.094, Aspek Website Andalalin dengan nilai prioritas sebsar 0.074, serta Aspek Kewenangan Status Jalan dan Aspek Sanksi dengan nilai prioritas terkecil dengan nilai masing-masing 0.060.

Secara hierarki, maka untuk aspek evaluasi implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), hasil pengujian AHP hambatan dan solusi strategis dengan nilai prioritas tertinggi dapat dilihat pada bagan berikut:

ASPEK EVALUASI	Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP)	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	Aspek Sosialisasi atau Forum	Aspek Monitoring dan Evaluasi	Aspek Website Andalalin	Aspek Kewenangan Status Jalan	Aspek Sanksi
Nilai Prioritas	0,320	0,262	0,130	0,094	0,074	0,060	0,060
<b>HAMBATAN</b>	Keterlibatan pihak dalam menjalankan kebijakan ANDALALIN	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi penilai ANDALALIN	Sosialisasi SOP Pelayanan Andalalin, JUKLAK dan JUKNIS Penulisan Dokumen ANDALALIN kepada masyarakat/pemrakarsa	Kegiatan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas belum secara berkelanjutan	Belum tersedia teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk operasional	Pemerintah daerah kesulitan mendapat informasi terkait kewenangan baik itu kewenangan daerah, provinsi, maupun kewenangan nasional.	Penerapan sanksi administrative
Nilai Prioritas	0,667	0,797	0,838	0,813	0,727	0,819	0,819
<b>SOLUSI STRATEGIS</b>	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi SOP	Peningkatan kualitas SDM dalam bidang Lalu lintas melalui BIMTEK Lembaga yang memberikan Sertifikasi Penilai ANDALALIN di Kementerian Perhubungan	Sosialisasi ANDALALIN yang dilakukan secara berkala	Menyusun rencana monitoring dan evaluasi terencana dan sistematis yang rutin untuk implementasi kebijakan ANDALALIN.	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan Website JADI ANDALAN bagi masyarakat/pemrakarsa	Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat	Menyusun sanksi progresif yang lebih terstruktur
Nilai Prioritas	0,558	0,487	0,527	0,533	0,374	0,355	0,671

Gambar 4. Hierarki Aspek Evaluasi, Hambatan, dan Solusi Strategis

## V. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan ANDALALIN di Kabupaten Brebes saat ini terdapat beberapa kekurangan yang bersifat administratif dan dibutuhkan tindak lanjut dari Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang sudah terbit di Kabupaten Brebes. Kemudian dalam pelaksanaan penerbitan ANDALALIN, Pemerintah Kabupaten Brebes sudah melaksanakan di tiap butir komponen peraturan yang ada sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes mampu mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan baik.

Terdapat 7 aspek dalam menilai implementasi kebijakan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Brebes, secara berurutan, Aspek tersebut adalah Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan nilai prioritas sebesar 0.320, kemudian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai prioritas sebesar 0.262, Aspek Sosialisasi dengan nilai priortas sebesar 0.130, Aspek Monitoring dan Evaluasi dengan nilai prioritas sebesar 0.094, Aspek Website Andalalin dengan nilai prioritas sebsar 0.074, serta Aspek Kewenangan Status Jalan dan Aspek Sanksi dengan nilai prioritas terkecil dengan nilai masing-masing 0.060.

Dalam aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatannya terletak pada tingkat keterlibatan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan ANDALALIN. Kedua, dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), tantangannya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan evaluasi ANDALALIN. Ketiga, dalam aspek Sosialisasi atau Forum, diperlukan upaya untuk menyosialisasikan SOP Pelayanan Andalalin dan pedoman penulisan dokumen ANDALALIN kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Keempat, dalam aspek Monitoring dan Evaluasi, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang lebih berkelanjutan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas. Kelima, dalam aspek Website Andalalin, infrastruktur teknologi yang memadai belum tersedia untuk mendukung operasionalnya. Keenam, dalam aspek Kewenangan Status Jalan, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi terkait kewenangan jalan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Terakhir, dalam aspek Sanksi, penerapan sanksi administratif masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ANDALALIN.

Dalam mengatasi hambatan diatas, berikut adalah solusi-solusi yang dapat diterapkan; Untuk aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), diperlukan penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi mengenai SOP secara teratur guna memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten. Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam bidang lalu lintas melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diberikan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi penilai ANDALALIN di Kementerian Perhubungan. Untuk aspek Sosialisasi atau Forum, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala agar informasi mengenai ANDALALIN dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam aspek Monitoring dan Evaluasi, diperlukan penyusunan rencana monitoring dan evaluasi yang terencana

dan sistematis secara rutin guna memantau pelaksanaan kebijakan ANDALALIN dengan lebih efektif. Untuk aspek Website ANDALALIN, langkah yang dapat diambil adalah menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan website ANDALALIN kepada masyarakat dan pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Dalam aspek Kewenangan Status Jalan, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai status kewenangan jalan. Terakhir, dalam aspek Sanksi, diperlukan penyusunan sanksi yang lebih terstruktur dan progresif guna meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ANDALALIN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] S. Fatimah, *Pengantar transportasi*. Myria Publisher, 2019.
- [2] H. A. Karim *et al.*, *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- [3] A. S. Anom, A. Purba, and G. F. Nama, "Analisis Kebutuhan Layanan Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung," in *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2022.
- [4] Y. E. Ardana and others, "Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Beroperasinya Hotel Swiss Belinn Kota Singkawang," *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, vol. 8, no. 1.
- [5] F. F. Salsabila, "Traffic Impact Analysis Result The Construction of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Exclusive Airport Using the PTV Vissim Software," *STUDENT JOURNAL GELAGAR*, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2023.
- [6] O. Z. Tamin, "Menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan di kota-kota besar di indonesia," *Jurnal Transportasi*, vol. 7, no. 2, 2007.
- [7] A. S. Widodo, "Analisis Dampak Lalu–Lintas (Andalalin) pada Pusat Perbelanjaan yang Telah Beroperasi Ditinjau dari Tarikan Perjalanan (Studi Kasus Pada Pacific Mall Tegal)," program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- [8] "Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas".
- [9] M. Perhubungan, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas," *Menteri Perhubungan. Jakarta*, 2015.
- [10] G. S. Angkoso, N. Hidayati, and Y. A. Saputro, "Analisis Kinerja Ruas Jalan Menggunakan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (Mkji) 1997 Pada Ruas Jalan Jepara–Kudus Km 11 Sampai Km 15," *J. Civ. Eng. Study*, vol. 1, no. 38, pp. 19–25, 2021.
- [11] M. Aldiansyah, "Analysis Impact of Traffic (Andalalin) Kawasan Mall Transmart of Tajur Road Bogor," *Astonjadro*, vol. 11, no. 2, pp. 263–274, 2022.
- [12] H. Prasetyo, T. Pramono, F. A. Prissando, and others, "Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Trenggalek (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Dan Prasarana Perlengkapan Jalan)," *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, vol. 6, no. 1, pp. 188–202, 2022.
- [13] F. Prasetyo, "Kewenangan dalam Penerapan Pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 4, no. 2, pp. 207–218, 2016.
- [14] N. A. Burhani and B. H. Susilo, "Identifikasi Faktor Dan Kriteria Dalam Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Terhadap Pembangunan Kawasan (Studi Kasus Kawasan Industri Cikembar Kabupaten Sukabumi).," *Journal of Syntax Literate*, vol. 7, no. 6, 2022.
- [15] D. E. Agustinova, "Memahami metode penelitian kualitatif." Yogyakarta: Calpulis, 2015.